

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



Oleh

RENDY YOVIELDY
NIM 10576002265

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009

ABSTRAK
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM
CALON LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KECAMATAN BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS

Oleh:
Rendy Yoviheldy

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis priode 2009-2014 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan metode pengumpulan data quisioner, wawancara, dan observasi. Tehnik analisa data yang digunakan yaitu teknik kualitatif dengan analisa dan pengamatan secara langsung terjun kemasyarakat.

Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Calon Anggota Legislatif Kecamatan Bengkalis priode 2009-2014, di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat dari partisipasi masyarakat mulai dari pendaftaran, Kampanye, Pemilihan dan Penghitungan Suara.

Penelitian ini juga menyarankan agar Aparatur Pemerintah Kecamatan Bengkalis agar mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pemilihan (hak suara) serta menindaklanjuti setiap usul dan saran masyarakat sehingga pemilihan kedepanya lebih berskala sukses.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi ini banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individual maupun sosial yang menyangkut pola hidup dan tatanan kehidupan yang dijalannya. Hal ini banyak berkaitan dengan adanya sistem yang berlaku baik dari norma Adat, Budaya, Agama, maupun Hukum.

Salah satu masalah besar yang sering menjadi persoalan dalam bermasyarakat adalah kecenderungan individu-individu dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidak pedulian individu-individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti Pemilu Legislatif pada tahun 2009.

Pemilu adalah sebuah pesta Demokrasi yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Legislatif seperti DPR-RI, DPRD Tk I, DPRD Tk II dan DPD dan selanjutnya akan dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan anggota Legislatif tersebut dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang memilihnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul baik cakupan Indonesia secara umum maupun Daerah seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemilihan Legislatif ini merupakan salah satu wahana yang digunakan dalam menentukan sosok seorang pemimpin yang sesuai kriteria yang dibutuhkan dan diharapkan akan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbagai kebijakan akan diambil oleh wakil rakyat untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan serta tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan peranan partisipasi masyarakat sangat penting. Karena partisipasi masyarakat sangat menentukan bagi keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dan diharapkan dapat memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Lijan Poltak Sinambela (2006: 37), menyatakan bahwa partisipasi ditinjau dari etimologis merupakan padanan *Participation* (Bahasa Inggris), yang berarti bagian atau ikut serta. Partisipasi adalah bagian keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fisik baik itu menyumbang Tenaga, Pikiran, maupun uang. Partisipasi merupakan peran serta seseorang dalam suatu lingkungan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan DPRD yang diharapkan adalah mendapatkan seorang wakil rakyat yang benar-benar sanggup memperjuangkan keinginan masyarakat dan mampu mewujudkan suatu perubahan dan memberikan pelayanan sebaik mungkin agar masyarakat merasa dilindungi serta benar-benar memikirkan kehidupan masyarakatnya.

Lebih lanjut Lijan Poltak Sinambela (2006 : 37), juga mengatakan tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (Keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya. Dimana keputusan publik diambil untuk memberikan kepuasan dan dukungan

publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Artinya, Partisipasi merupakan konsultasi dengan masyarakat atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka pemilihan wakil-wakil rakyat nantinya tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu motivasi memberikan motif atau hal yang menyangkut dorongan seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu sangat diperlukan.

Partisipasi masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu Negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Disamping itu juga diharapkan agar proses Pemilihan Legislatif dapat berjalan dengan lancar dan dapat menciptakan suatu legitimasi bagi sistem politik.

Pemilu legislatif adalah pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilaksanakan 5 (Lima) tahun sekali.

Dalam hal ini untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun syarat untuk menjadi bakal anggota DPRD yang tertuang dalam UU Pemilu No 10 tahun 2008 pasal 50 ayat I bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dijelaskan sebagai berikut :

1. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (Dua Puluhan Satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap Berbicara, Membaca, dan Menulis dalam Bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengurus Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,

wewenang, dan hak sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (Satu) Lembaga Perwakilan; dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (Satu) Daerah Pemilihan.
2. Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.
 - b. Bukti kelulusan berupa foto copy ijazah, STTB, Sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
 - c. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan

keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengurus Pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Pengurus Pada Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- i. Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (Satu) partai politik untuk 1 (Satu) Lembaga Perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (Satu) Daerah Pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

Setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, harus memenuhi syarat-syarat diatas, karena syarat-syarat diatas merupakan persyaratan yang mutlak yang harus dipenuhi calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam UU Pemilu No 10 tahun 2008 menjelaskan Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Serta dilanjutkan dengan pasal 8 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di 2/3 (Dua Pertiga) jumlah Provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (Dua Pertiga) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;
- d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (Seribu) orang atau 1/1.000 (Satu Perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota;
- f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan g. Mengajukan nama dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 banyak mengalami perubahan dari mulai pelaksanaan tata cara Pemilihan sampai pada penentuan Anggota Legislatif dengan suara terbanyak. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang belum mengetahui dengan baik tentang tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**.

1.2. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2009 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Calon Legislatif, di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2009.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, membangun dan mengembangkan khasanah keilmuan.
- b. Memberikan sumbangan kajian yang mendalam tentang partisipasi masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya Kecamatan Bengkalis.
- b. Sebagai informasi dari partisipasi yang diberikan oleh masyarakat tentang Pemilihan Calon Legislatif.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang berapa teori-teori, definisi konsep dan definisi operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian. seperti, lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : ANALISA DATA

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang analisis partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bengkalis.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Saligman dan Edwin (dalam Muhammad Al-Amin, 2003 : 9), partisipasi yaitu ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.

Ramlan Subakti (1999:140), Mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam Negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan.

Lijan Poltak Sinambela (2006 : 37), pemahaman konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Konsep pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta (Partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak (Individu atau Kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan dan keputusan. Keputusan itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh dikemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, kelompok sasaran dan sering pula berpengaruh bagi lingkungannya.

Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu, dengan jalan memilih Pemimpin Negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan

pemerintah. Partisipasi politik menurut Meriam Budiarjo bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat berbentuk piramida, ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu dibuktikan dirinya unggul dari pada orang lain. Atau dengan perkataan lain struktur piramida kekuasaan terbentuk dalam sejarah masyarakat (Budiarjo, 2004: 36).

Herbert (dalam Budiarjo, 1998:2), mendefenisikan konsep partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Arifin, (2003:131), memandang partisipasi politik sebagai kegiatan Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah .

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif. Yang mana dari definisi tersebut Huntington menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah mencakup kegiatan riil bukan pernyataan sikap, selanjutnya partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan politik bagi pengikutnya (James Rosenau dan Nimmo, 2000:126).

Ragamaran mengatakan partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politikpun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik sosialisasi politik tidak dapat berjalan (Ragamaran, 2002:147).

Lijan Poltak Sinambela (2006 : 37), Tujuan dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (Keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya.

Dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat sangat memerlukan motivasi sehingga mau berbuat sesuatu yang telah direncanakan baik secara sendiri maupun dengan orang lain. Seseorang mau ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif DPRD disebabkan adanya motivasi dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu menjadi panutan dalam kehidupan mereka dan merubah kehidupan menjadi lebih baik.

Kartini Kartono (2005 : 101), mengemukakan bahwa motivasi adalah sebab, alasan dasar, gambaran, dorongan bagi seseorang untuk berbuat ide pokok yang berpengaruh sekali terhadap segenap tingkah laku manusia. Seseorang akan berpartisipasi karena adanya motivasi sehingga mereka mau memilih seorang wakil rakyat, mungkin karena ada sesuatu yang diberikan kepadanya.

Milbarth (dalam Surbakti, 1992:143), menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik :

1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam dunia politik.
2. Karena faktor karakteristik seseorang, orang-orang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya.
3. Faktor karakter sosial seseorang, menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik.

4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Morris Rosenberg (Sri Erlanda, 2005: 54), mengemukakan ada tiga alasan mengapa orang malas berpartisipasi dalam kehidupan politik :

1. Karna ketakutan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, dan sebagian orang beranggapan bahwa politik ancaman dalam kehidupan.
2. Karena beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan, dan beranggapan bahwa berpartisipasi politiknya dan akan mempengaruhi proses politiknya.
3. Karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menurut (Merphin Panjaitan, 2000:8), mengatakan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi kadar Demokrasi Negara tersebut.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Demos* yang artinya Rakyat dan *Cratos* yang artinya Pemerintahan, dengan demikian berarti pemerintahan rakyat. Sebagai mana diungkapkan Giddes (dalam Ghofur, 2002:15), bahwa demokrasi pada dasarnya mengandung makna sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukan raja atau bangsawan.

Dalam suatu Negara demokrasi, sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sebagai tolak ukur dari keberhasilan sistem politiknya. Semakin banyak Warga Negara yang berpartisipasi menunjukkan bahwa semakin berhasilnya sistem

politik Negara tersebut. Tetapi kalau partisipasi politik Warga Negara rendah maka dapat dikatakan sistem politikya kurang baik.

2.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Huntington mengemukakan bahwa partisipasi politik itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk antara lain:

1. Kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampanye.
2. Bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon dan lain sebagainya (Arifin, 2003:140).

Sejalan dengan Huntington, Almond (dalam Mas'oed dan Adrews, 1997:48), juga mengemukakan ada dua bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat yakni partisipasi politik konvensional yang meliputi: Pemberian suara, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik non konvensional seperti pengajuan potensi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik manusia serta perang dan gerilya.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005 : 135-138), partisipasi Warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. Partisipasi dalam Pemilihan
2. Partisipasi kelompok.
3. Kontak antara Warga Negara dengan Pemerintah
4. Partisipasi Warga Negara secara langsung dilingkungan Pemerintah

Lebih lanjut Huntington menyatakan ada dua sifat partisipasi politik yakni partisipasi otonom dan partisipasi yang mobilisasi. Partisipasi politik yang otonom maksudnya adalah partisipasi spontan yang diberikan seseorang atas keinginannya sendiri. Sedangkan partisipasi yang mobilisasi adalah partisipasi yang diberikan atas dasar rangsangan atau tindak atas instruksi dan sebagian besar digerakkan oleh loyalitas, rasa cinta, rasa hormat atau rasa takut terhadap seorang pemimpin (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990:173).

Partisipasi yang otonom ini biasanya terdapat dalam masyarakat yang maju sedangkan di Negara berkembang yang masyarakatnya belum begitu maju sering kita jumpai partisipasi yang sifatnya mobilisasi.

2.3. Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *Musyarak* yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Ralf Linton dalam Abdul syani, 2002 :31), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ciri-ciri masyarakat yang hidup bersama adalah sebagai berikut :

1. Bercampur untuk waktu yang lama.
2. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan.
3. Mereka merupakan satu sistem hidup bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dengan yang lain saling ketergantungan. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, kita selalu memerlukan orang lain, karena kita tahu bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Menurut Harold J. Laski (dalam Meriam Budiarjo, 2004: 34), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai/terwujudnya keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan harus ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan terjaga keamanannya.

Dari apa yang dikemukakan oleh Harold J. Laski dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan manusia perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia, agar terjaga dan terpelihara dari ancaman-ancaman yang merusak kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya aturan (Hukum), manusia akan merasa takut untuk mengganggu dan berbuat jahat kepada orang lain.

Harold Lasswell (dalam Meriam Bidiarjo, 2004 : 33), mengamati kehidupan masyarakat disekelilingnya, yaitu masyarakat Barat ia memperinci delapan nilai yang diingini yaitu :

1. Kekuasaan
2. Pendidikan/Penerangan
3. Kekayaan
4. Kesehatan
5. Keterampilan

6. Kasih sayang
7. Kejujuran
8. Keseganan

Mariam Budiarjo (2000 : 32), dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Dalam kehidupan masyarakat dan dalam hubungannya dengan orang lain, pada dasarnya setiap manusia pasti menginginkan nilai-nilai diatas, karena nilai-nilai diatas merupakan suatu kebutuhan yang ingin diwujudkan dan menjadikan impian bagi setiap orang.

2.4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum menurut UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan yang dilaksanakan ini adalah untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah

Sedangkan yang boleh memilih dalam Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau Sudah/Pernah kawin. (UU No. 10 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat 22)

Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran Peserta Pemilu;
- c. Penetapan Peserta Pemilu;
- d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan;
- e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Masa kampanye;
- g. Masa tenang;
- h. Pemungutan dan penghitungan suara;
- i. Penetapan hasil Pemilu; dan
- j. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (UU No. 10 tahun 2008 Bab II Pasal 4 ayat 2).

2.5. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Bidang penyelesaian sengketa adalah bidang yang menyelesaikan sengketa antara 2 pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya:

1. Perbedaan penafsiran antara para pihak; atau
2. Suatu ketidaksepakatan tertentu;

Dan kedua sebab tersebut berhubungan dengan fakta kegiatan dan peristiwa, hukum dan kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan: penolakan, pengakuan yang berbeda serta penghindaran.

Ruang lingkup sengketa Pemilu yang dapat diselesaikan Pengawas Pemilu adalah setiap sengketa yang timbul dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai dengan pengucapan Sumpah/Janji anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten. Kecuali sengketa tentang hasil Pemilu yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam sengketa Pemilu adalah:

1. Penyelenggara Pemilu
2. Partai Pemilu peserta Pemilu, yaitu antara lain Dewan Pimpinan Tingkat Nasional, Dewan Pimpinan tingkat Propinsi, Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten/Kota, dst.
3. Peserta Pemilu perseorangan untuk pemilihan anggota DPD.
4. Anggota dan/atau pengurus partai politik peserta Pemilu
5. Warga Negara yang memiliki hak pilih
6. Pemantau Pemilu

Sengketa Pemilu diusahakan dapat didamaikan antara kedua belah pihak, penyelesaian alternatif suatu sengketa adalah proses-proses diluar pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, dengan cara:

1. memfasilitasi komunikasi, pengertian, keinginan dan kemampuan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa oleh mereka sendiri.
(contoh, mediasi)

2. Mengajukan alternatif atau rekomendasi
3. Keputusan (contoh, arbitrase).

Proses penyelesaian sengketa Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan berkas laporan sebagai sengketa Pemilu oleh Pengawas Pemilu Penerima Laporan.
- b. Penyerahan berkas laporan sengketa Pemilu oleh Pengawas Pemilu penerima laporan kepada Pengawas Pemilu yang berwenang.
- c. Pengkajian dan pemeriksaan berkas laporan tentang sengketa Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang berwenang
- d. Pemanggilan pihak yang bersengketa oleh Pengawas Pemilu yang berwenang
- e. Apabila pertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat tercapai maka dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara Musyawarah dan Mufakat
- f. Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat maka Pengawas Pemilu yang berwenang menawarkan alternatif Penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa, dan apabila disetujui maka dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Alternatif Penyelesaian Pengawas Pemilu.
- g. Apabila tawaran alternatif penyelesaian tidak diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak maka Pengawas pemilu memberikan putusan final dan mengikat, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Putusan Pengawas Pemilu.

Jika diambil garis besar dari penjelasan diatas tentang Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu, maka sengketa Pemilu dapat dibagi kedalam 3 tahap, yaitu:

1. Tahap pertama: penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah dan mufakat.
2. Tahap kedua: Penyelesaian sengketa melalui alternatif dari Pengawas Pemilu.
3. Tahap ketiga: Pengawas Pemilu mengeluarkan Keputusan Final dan Mengikat.

Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam proses musyawarah atau menyelesaikan sengketa:

1. Pihak yang bersengketa harus didorong oleh kepentingan dan tujuan karena orang-orang harus mempunyai kepentingan atau alasan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa.
2. Proses yang inklusif karena semua mempunyai kepentingan khusus tentang masalah-masalah ini harus terlibat dalam proses.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang proses karena walaupun rancangan proses telah dibuat, akan tetapi ada kesempatan bagi peserta untuk berpartisipasi dalam merancang beberapa aspek dari rancangan proses tersebut.
4. Fleksibilitas proses dimana proses penyelesaian sengketa diusahakan fleksibel *Penyelesaian Sengketa*

Bidang penyelesaian sengketa adalah bidang yang menyelesaikan sengketa antara 2 pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya:

1. Perbedaan penafsiran antara para pihak; atau

2. Suatu ketidaksepakatan tertentu;

Dan kedua sebab tersebut berhubungan dengan fakta kegiatan dan peristiwa, hukum dan kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan: penolakan, pengakuan yang berbeda serta penghindaran.

Ruang lingkup sengketa Pemilu yang dapat diselesaikan Pengawas Pemilu adalah setiap sengketa yang timbul dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai dengan pengucapan Sumpah/Janji anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten. Kecuali sengketa tentang hasil Pemilu yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam sengketa Pemilu adalah:

1. Penyelenggara Pemilu
2. Partai Pemilu peserta Pemilu, yaitu antara lain Dewan Pimpinan Tingkat Nasional, Dewan Pimpinan tingkat Propinsi, Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten/Kota, dst.
3. Peserta Pemilu perseorangan untuk pemilihan anggota DPD.
4. Anggota dan/atau pengurus partai politik peserta Pemilu
5. Warga negara yang memiliki hak pilih
6. Pemantau Pemilu

Sengketa Pemilu diusahakan dapat didamaikan antara kedua belah pihak, penyelesaian alternatif suatu sengketa adalah proses-proses diluar pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, dengan cara:

1. Memfasilitasi komunikasi, pengertian, keinginan dan kemampuan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa oleh mereka sendiri.
(contoh, mediasi)
2. Mengajukan alternatif atau rekomendasi
3. Keputusan (contoh, arbitrase).

Proses penyelesaian sengketa Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan berkas laporan sebagai sengketa Pemilu oleh Pengawas Pemilu Penerima Laporan.
- b. Penyerahan berkas laporan sengketa Pemilu oleh Pengawas Pemilu penerima laporan kepada Pengawas Pemilu yang berwenang.
- c. Pengkajian dan pemeriksaan berkas laporan tentang sengketa Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang berwenang
- d. Pemanggilan pihak yang bersengketa oleh Pengawas Pemilu yang berwenang
- e. Apabila pertemuan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat tercapai maka dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara Musyawarah dan Mufakat
- f. Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat maka Pengawas Pemilu yang berwenang menawarkan alternatif Penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa, dan apabila disetujui maka dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Alternatif Penyelesaian Pengawas Pemilu.
- g. Apabila tawaran alternatif penyelesaian tidak diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak maka Pengawas pemilu memberikan putusan final dan

mengikat, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Putusan Pengawas Pemilu.

Jika diambil garis besar dari penjelasan diatas tentang Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu, maka sengketa Pemilu dapat dibagi kedalam 3 tahap, yaitu:

1. Tahap pertama: penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah dan mufakat.
2. Tahap kedua: Penyelesaian sengketa melalui alternatif dari Pengawas Pemilu.
3. Tahap ketiga: Pengawas Pemilu mengeluarkan Keputusan Final dan Mengikat.

Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam proses musyawarah atau menyelesaikan sengketa:

1. Pihak yang bersengketa harus didorong oleh kepentingan dan tujuan karena orang-orang harus mempunyai kepentingan atau alasan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa.
2. Proses yang inklusif karena semua mempunyai kepentingan khusus tentang masalah-masalah ini harus terlibat dalam proses.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang proses karena walaupun rancangan proses telah dibuat, akan tetapi ada kesempatan bagi peserta untuk berpartisipasi dalam merancang beberapa aspek dari rancangan proses tersebut.
4. Fleksibilitas proses dimana proses penyelesaian sengketa, tidak hanya memakai dasar normatif yang ada, akan tetapi bisa diambil berbagai

pendekatan misalnya; pendekatan secara sosiologis dan pendekatan secara lebih filosofis.

5. Mencari pertimbangan dalam musyawarah adalah persamaan dalam kesempatan untuk berpartisipasi karena peserta harus mempunyai akses yang sama kepada informasi yang terkait dan kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif.
6. Menimbulkan pengertian dan rasa hormat terhadap kepentingan yang berbeda, karena penerimaan atas perbedaan dalam nilai, kepentingan dan pengetahuan tentang pihak-pihak yang terlibat sangat penting.
7. Harus diperhatikan dalam musyawarah untuk menyelesaikan sengketa adalah proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena pertanggungjawaban terhadap kepentingan yang mereka wakili dan terhadap proses yang telah disetujui untuk dilakukan sangat penting.
8. Tentang pembatasan waktu karena tabel waktu yang realistis yang berpusat pada proses, memaksimumkan sumber daya akan membuat kemajuan.
9. Harus dipertimbangkan adalah dalam komitmen kepada penerapan dan pemantauan sangatlah penting bagi suksesnya proses penyelesaian sengketa tersebut.

2.6. Defenisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini

untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti.

Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah:

1. Partisipasi adalah keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
2. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu, dengan jalan memilih Pemimpin Negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.
3. Demokrasi adalah mengandung makna sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukan raja atau bangsawan.
4. Motivasi adalah sebab, alasan dasar, gambaran, dorongan bagi seseorang untuk berbuat ide pokok yang berpengaruh sekali terhadap segenap tingkah laku manusia untuk memilih seorang wakil rakyat.
5. Bentuk-bentuk partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan mulai dari pendataan pemilih, diskusi publik, kampanye, pemilihan, dan lain-lain.
6. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
7. Pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemilihan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat di daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
 1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam dunia politik.
 2. Karena faktor karakteristik seseorang, orang-orang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan Sosial, Politik, Ekonomi, dan lainnya.
 3. Faktor krakter sosial seseorang, menyangkut status sosial Ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan prilaku seseorang dalam bidang politik.
 4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

2.7. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel (Masri Siangarimbun, 2006:46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variable tersebut. Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten

Bengkalis tahun 2009

- Pendaftaran Pemilih
- Kampanye
- Pemilihan
- Penghitungan Suara

2.8. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut: “ **Diduga Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Dalam Mengikuti Pelaksanaan Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2009 Tinggi**”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sugiono, 2005 : 11).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2009. Waktu penelitian diperkirakan setelah melaksanakan seminar proposal Bulan Juni 2009.

Perubahan paradigma pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa Kecamatan tidak lagi perangkat wilayah akan tetapi berubah menjadi perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati. Pelimpahan kewenangan difokuskan pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang Pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Suryabrata, 2003 : 39).
2. Data Sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat di Kecamatan Bengkalis yang berjumlah 56.445 Orang yang terdiri dari: Aparat Pemerintah Kelurahan, BPD dan masyarakat

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi nara sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti. Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini Aparat Pemerintah Kelurahan, BPD dan masyarakat Kecamatan Bengkalis adalah 100 orang dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2005 : 146) yaitu :

$$n = \frac{N}{\dots}$$

$$\boxed{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{56.445}{1 + 56.445 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{56.445}{1 + 56.445(0,10)^2}$$

$$n = \frac{56.445}{1 + 56.445 (0,01)}$$

$$n = \frac{56.445}{565.45}$$

$$n = 99.82$$

$$n = 100 \text{ Orang}$$

Jadi, dari perhitungan jumlah populasi sebesar 56.445 orang dengan jumlah kelonggaran 10 %, maka dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 100. Teknik yang digunakan dalam pengambilan

sampel menggunakan metode Random sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak.

3.5. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Suryabrata, 2003 : 39).
2. Data Sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh.
2. Quisioner yaitu peneliti mengajukan daftar pertanyaan kepada responden mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3.7. Analisa Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu deskriptif, maka analisa datanya menggunakan deskriptif kualitatif dengan persentase dan digambarkan pula dalam bentuk kata-kata atau kalimat terpisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hal tersebut dilakukan agar data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis memisah-misahkan data menurut jenisnya. Setelah data terpisah menurut jenisnya, maka baru dilakukan kegiatan yang dinamakan meneliti data, setelah itu baru dianalisa dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian yang dilengkapi dengan tabel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kecamatan Bengkalis

Bengkalis merupakan Kabupaten dengan julukan Negeri Junjungan, pusat Kota terletak di Kecamatan Bengkalis terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Minang dengan mayoritas penduduknya adalah Melayu. Asal mula terbentuknya nama Bengkalis berawal dari kedatangan Tuan Bujang alias Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah beserta pembantu dan pengikutnya pada tahun 1722 di Kepulauan Bengkalis. Diambil dari kata "*Mengkal*" yang berarti sedih atau sebak dan "*Kalis*" yang berarti tabah, sabar dan tahan ujian. Raja Kecil mengungkapkan kepada pembantu dan pengikutnya "*Mengkal* rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai Sultan yang memerintah Negeri, namun tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima keadaan ini" ketika ingin merebut tahta Kerajaan Johor. Sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda sedang Mengkal tapi masih Kalis, akhirnya ucapan itu menjadi perkataan "*oh baginda sedang Mengkalis*". Dari kisah ini timbullah perkataan Mengkalis dan lama kelamaan perkataan ini berubah menjadi "*Bengkalis*"

Adapun kedatangan Raja Kecil beserta pembantu dan pengikutnya disambut oleh Batin Senggoro, Batin Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dll. Raja Kecil adalah pewaris Raja Johor, sehingga membuat batin-batin tersebut lebih hormat dan mereka mengusulkan agar Raja Kecil membangunkan Kerajaan di pulau Bengkalis. Namun melalui musyawarah beliau dengan 37 Laksemana Bukit Batu, Datuk Pesisir, Datuk

Tanah Datar, Datuk Lima Puluh, Datuk Kampar dan Para Batin disepakati bahwa pusat Kerajaan di dirikan didekat Sabak Aur yakni di Sungai Buatan salah satu anak Sungai Siak. Sehingga pada tahun 1723 dibangunlah pusat Kerajaan dan berkembang menjadi Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Bengkalis pernah menjadi basis awal Kerajaan Siak dan dibengkalis pulalah wawasan mendirikan kerajaan Siak dimufakati. Jauh sebelum kedatangan Raja Kecil, Bengkalis telah menunjukkan peran penting dalam arus lalu lintas niaga di Selat Melaka, terutama sebagai tempat persinggahan saudagar yang keluar masuk Sungai Siak.

4.2. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dan berada di wilayah Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 11.481,77 km². Ibu Kota Kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi, yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas.

Ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 11.481,77 km² dengan batas sebagai berikut:

Tabel 4.1

Letak Geografis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

<u>Utara</u>	<u>Selat Malaka</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kabupaten Siak</u>
<u>Barat</u>	<u>Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu</u>
<u>Timur</u>	<u>Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun</u>

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis 2009

Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 13 Kecamatan dengan luas wilayah 11.481,77 km². Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 690.366 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti : Suku Minang, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Batak, Etnis Tionghoa dan sebagainya. Bengkalis sebagai ibu kota Kabupaten dikenal juga dengan julukan Kota Terubuk, karena Daerah ini adalah penghasil *telur ikan Terubuk* yang sangat disukai masyarakat karena rasanya yang amat lezat dan tentu saja menyebabkan harga *telur ikan Terubuk* menjadi amat mahal. Kota lainnya adalah Duri sebagai Daerah penghasil minyak.

4.3. Perekonomian

Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Bengkalis:

Sebelum dibagi menjadi empat Pemerintahan Kabupaten, Kabupaten Bengkalis merupakan penghasil minyak bumi terbesar, tidak hanya di Provinsi Riau tapi juga di

Indonesia. Saat ini ladang-ladang minyak bumi terdapat di Kecamatan Mandau, Bukit Batu dan Merbau. Pengelolaannya dilakukan oleh PT Caltex Pasific Indonesia (kini: PT Chevron Pasific Indonesia) dengan wilayah operasi di Kecamatan Mandau dan Bukit Batu serta perusahaan Kondur Petroleum SA yang wilayah Konsensi/Operasionalnya meliputi Kecamatan Merbau, Tebing Tinggi, Rangsang, Bengkalis, dan Perairan Bengkalis disekitar Selat Malaka.

Selain minyak bumi, terdapat pula potensi tambang pasir, yang sebagian besar terdapat di Pulau Rupat dan Rangsang serta potensi gambut yang terdapat di Pulau Bengkalis, Tebing Tinggi dan Rangsang serta deposit batubara di Kecamatan Rupat.

a. Perikanan

Dikabupaten Bengkalis memiliki 26 Pulau besar dan kecil serta memiliki perairan yang cukup luas dan garis pantai yang panjang sehingga Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sumber daya Perikanan laut. Selain produksi dari hasil perikanan tangkap, di Kabupaten Bengkalis telah berkembang sistem Keramba Jaring Apung (KJA).

Pada tahun 2005, berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi (DPPI) Kabupaten Bengkalis, produksi dari sektor perikanan berjumlah 8.302.2 ton. Angka tersebut berasal dari sektor Perikanan Laut, Tambak dan budidaya air tawar.

b. Perkebunan

Komoditi utama Kabupaten Bengkalis sektor perkebunan adalah Kelapa, Karet dan Kelapa Sawit. Disamping itu ada pula berbagai jenis tanaman seperti Kopi, Kakao, dan Pinang.

c. Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Bengkalis pada umumnya diusahakan oleh masyarakat dalam skala kecil, dengan jenis ternak seperti sapi, kambing/domba, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras (Bukan Ras), babi, dan itik. Populasi ternak pada tahun 2005 adalah sapi sebanyak 8.763 ekor, kerbau 3.635 ekor, kambing 75.340 ekor, dan babi 19.734 ekor. Selanjutnya, ayam pedaging 1.283.494 ekor, ayam buras/kampung 2.236.094 ekor dan itik 9.895 ekor.

d. Kehutanan

Di Kabupaten Bengkalis terdapat 669.288 hektar hutan Negara yang tersebar pada 13 Wilayah Kecamatan. Hutan di Kabupaten Bengkalis meliputi flora dan fauna, sementara hutan bakau banyak di temui sepanjang pesisir pantai, dan hasil hutan lainnya banyak digunakan untuk bahan baku industri.

e. Industri

Disamping industri pengolahan BBM (Bahan Bakar Minyak) milik UP.2 Pertamina di Sungai Pakning, di Kabupten Bengkalis saat ini terdapat industri pengolahan hasil hutan seperti industri kayu gergajian, meubel, industri arang bakau yang hasilnya, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam Negeri, juga untuk tujuan ekspor. Selain itu terdapat pula industri kecil dan rumah tangga (Home Industry) seperti kerajinan kain tenun tradisional Bukit Batu (Tenun Lejo), industri kecil makanan seperti lempuk durian, dodol nenas, dan industri kerajinan kayu/kiran.

f. Pariwisata

Secara umum potensi pariwisata di Kabupaten bengkalis belum sepenuhnya secara proporsional. Meskipun sebenarnya sangat prospektif untuk dikembangkan. Keindahan alam laut dan kehidupan budaya masyarakat Melayu yang khas dapat menjadi tujuan wisata yang menakjubkan di Provinsi Riau. Adapun beberapa objek wisata yang dapat dikembangkan, antara lain: pantai Selat Baru dan Perapat tunggal di Pulau Bengkalis. (*BPS Kabupaten Bengkalis* 2009).

* Pantai Pasir Panjang di Pulau Rupat

* Hutan Lindung dan tempat pelatihan gajah di Kecamatan Mandau Duri.

4.4. Pemerintahan

Perubahan paradigma pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Kecamatan tidak lagi perangkat wilayah akan tetapi berubah menjadi perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati. Pelimpahan kewenangan difokuskan pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang Pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan.

Tuntutan masyarakat yang menginginkan peningkatan kinerja aparat Pemerintah khususnya berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dirasakan terkesan sulit, lambat, berbelit-belit dan mahal. Selain itu Pelayanan Pemerintah kepada

masyarakat yang dinilai tidak transparan, dipersulit dan banyaknya pungutan liar (*Kantor Camat Bengkalis 2009*).

4.5. Sosial

Didalam masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mempunyai bermacam-macam Suku, diantaranya Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Suku yang paling dominan adalah Melayu. Masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah masyarakat asli yang dari dulunya berdomisili di Kabupaten Bengkalis. Masyarakatnya mampu saling membahu dalam suatu persoalan.

Tabel 4.2
BANYAKNYA SUKU TERASING YANG DIBINA
OLEH DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
Number of Uncultured Tribe Nurtured by Social Welfare Service

No	Kecamatan Sub Regency	Banyaknya Total					
		Keluarga House Hold			Jiwa Persons		
		2009	2008	2007	2009	2008	2007
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Mandau	141	801	944	544	4.000	4.347
2.	Pinggir	342	880	1.049	1.154	2.062	4.057
3.	Bukit Batu	-	-	-	-	-	-
4.	Siak Kecil	-	-	-	-	-	-
5.	Rupat	33	469	463	106	1.807	1.910
6.	Rupat Utara	519	1.073	838	2.564	4.434	3.362
7.	Bengkalis	164	725	699	724	4.229	3.797
8.	Bantan	1.296	1.259	1.211	5.255	3.458	5.182
Jumlah Total		2.495	5.207	5.204	10.347	19.990	22.655

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2009

4.6. Pendidikan

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (Mental), membuka sekolah umum, sekolah agama dan taman kanak-kanak di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4.3
BANYAKNYA MURID DAN GURU TAMAN KANAK-KANAK MENURUT
KECAMATAN
Number of Students and Teachers of Kindergarten by Sub Regency, 2009

Kecamatan Sub Regency		Banyaknya Murid Number of Student			Jumlah Guru Number of Teacher		
		Negeri State	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri State	Swasta Private	Jumlah Total
1.	Mandau	-	2.154	2.154	15	138	153
2.	Pinggir	-	215	215	-	21	21
3.	Bukit Batu	-	349	349	2	23	25
4.	Siak Kecil	31	59	90	1	14	15
5.	Bantan	-	172	172	1	5	6
6.	Bengkalis	142	509	651	9	62	71
7.	Merbau	-	55	55	1	6	7
8.	Rupat	-	131	131	2	8	10
9.	Rupat Utara	-	38	38	-	2	2
10.	Rangsang	-	138	138	1	12	13
11.	Rangsang Barat	-	-	-	-	-	-
12.	Tebing Tinggi	86	597	683	7	58	65
13.	Tebing Tinggi Barat	17	21	38	4	12	16
Jumlah Total		276	4.438	4.714	43	361	404

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2009

Tabel 4.4

BANYAKNYA GEDUNG DAN KELAS SEKOLAH DASAR
 Number of House and Class of Elemetary Scholl by Sub Regency, 2007

Kecamatan Sub Regency		Gedung House		Kelas Class	
		Negeri State	Swasta Private	Negeri State	Swasta Private
1.	Mandau	76	25	372	147
2.	Pinggir	35	7	144	33
3.	Bukit Batu	29	1	176	14
4.	Siak Kecil	20	-	139	-
5.	Bantan	31	3	183	4
6.	Bengkalis	58	-	983	-
7.	Merbau	54	7	239	28
8.	Rupat	27	3	123	11
9.	Rupat Utara	9	2	48	9
10.	Rangsang	26	-	120	-
11.	Rangsang Barat	25	4	132	24
12.	Tebing Tinggi	39	10	240	58
13.	Tebing Tinggi Barat	15	5	67	21
Jumlah Total		444	67	2.930	349

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2009

4.7. Kesehatan

Untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah telah mendirikan rumah sakit yang dibuka setiap hari bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila dilihat dari intensitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang membuka rumah sakit setiap hari, masih dirasakan kurang oleh masyarakat akibat kurangnya alat medis yang tersedia. Akan tetapi karena Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dekat dengan beberapa Kota disekitarnya maka masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis biasanya pergi keluar Kota untuk berobat, di karenakan jarak yang tidak begitu jauh.

Tabel 4.5
BANYAKNYA TENAGA MEDIS/PARAMEDIS PADA UNIT KESEHATAN
Number of Medical/Paramedical at Healthy Unit

No	Tahun	Dokter Umum <i>Doctor</i>	Dokter Gigi <i>Dentistry</i>	Dokter Spesialis <i>Especially Doctor</i>	Apoteker/ Sarjana Farmasi <i>Apothecary</i>	Sarjana Kesehatan Lain <i>Others</i>
1.	2009	50	16	25	9	22
2.	2008	62	22	22	9	21
3.	2007	54	25	13	5	16
4.	2006	84	25	6	5	16
5.	2005	64	21	10	5	9
6.	2004	64	21	10	5	9
7.	2003	62	17	8	3	-
8.	2002	25	11	5	2	53
9.	2001	23	11	3	2	3
10.	2000	23	10	3	2	3
Jumlah Total		511	179	105	47	152

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2009

Tabel 4.6
BANYAKNYA SARANA KESEHATAN
Number of Healthy Facilities,

No	Tahun	RSU Hospital	Puskesmas <i>Health Centre</i>	Pustu <i>Health Post</i>	RS Bersalin
1.	2009	3	12	53	1
2.	2008	3	19	76	2
3.	2007	3	19	73	2
4.	2006	3	16	72	-
5.	2005	3	16	70	3
6.	2004	3	16	70	1
7.	2003	1	16	70	1
8.	2002	1	16	69	1
9.	2001	1	16	59	-
10.	2000	1	12	60	-
Jumlah Total		22	158	672	11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2009

4.8. Agama

Agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mayoritas beragama Islam dan mereka taat dalam menjalankan ibadah.

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah, didukung dengan adanya sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya.

Tabel 4.7
BANYAKNYA RUMAH IBADAH
Number of Religion Worship Facilities, 2009

Kecamatan Sub Regency		Mesjid Mosques	Langgar	Musholla	Gereja Church	Wihara Tample	Pura
1.	Mandau	95	-	60	56	-	-
2.	Pinggir	32	-	-	-	-	-
3.	Bukit Batu	31	51	3	5	3	-
4.	Siak Kecil	43	-	-	-	-	-
5.	Bantan	62	52	-	-	-	-
6.	Bengkalis	61	77	24	8	9	-
7.	Merbau	69	64	-	1	3	-
8.	Rupat	39	31	2	8	5	-
9.	Rupat Utara	11	-	-	-	-	-
10.	Rangsang	40	80	-	1	6	-
11.	Rangsang Barat	42	-	-	-	-	-
12.	Tebing Tinggi	36	83	7	6	17	-
13.	Tebing Tinggi Barat	19	-	-	-	-	-
Jumlah Total		580	438	96	85	43	-

Sumber: Departemen Agama Kabupaten Bengkalis, 2009

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Deskripsi Variabel

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan angket yang disebarkan maupun wawancara langsung dapat diklarifikasikan mengenai keberadaan responden yang menjadi nara sumber dalam penelitian mengenai pengaruh partisipasi masyarakat, dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2009-2014.

5.1.1. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Untuk melihat tingkat pendidikan yang diraih oleh responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	15	15%
2	SLTP	30	30%
3	SLTA	20	20%
4	Akademi/Sarjana	35	35%
Jumlah		100	100 %

Sumber: Data angket, 2009

Dari tabel diatas terlihat pendidikan yang diraih oleh responden pada tingkat Sekolah Dasar berjumlah 15 orang (15%). Sedangkan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat berjumlah 30 orang (30%). Responden yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah 20 orang (20%) dan yang berpendidikan Akademi dan Sarjana yaitu 35 orang (35%).

5.1.2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Adapun identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	75	75%
2	Perempuan	25	25%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden penelitian ini untuk Laki-laki berjumlah 75 orang (75%) dan Perempuan berjumlah 25 orang (25%).

5.1.3. Identitas Responden Menurut Tingkat Umur

Tabel 5.3
Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	21-27	18	18%
2	28-34	29	29%
3	35-41	25	25%
4	42-48	19	19%
5	49-55	9	9%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berumur 21-27 tahun berjumlah 18 orang (18%), sedangkan responden yang berumur 28-34 tahun berjumlah 29 orang (29%), responden yang berumur 35-41 tahun berjumlah 25 orang (25%), responden yang berumur 42-48 tahun berjumlah 19 orang (19%) dan responden yang berumur 49-55 tahun berjumlah 9 orang (9%).

5.2. Tahapan Pemilu

Dalam UU Pemilu No 10 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dan 2 menjelaskan beberapa tahap penyelenggaraan Pemilu :

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran peserta pemilu;
 - c. Penetapan peserta pemilu;
 - d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan;
 - e. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. Masa Kampanye;
 - g. Masa tenang;
 - h. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. Penetapan hasil Pemilu; dan
 - j. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan dan dilanjutkan Pasal 5 dan ayat 1 dan 2
 - 2) Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
 - 3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak dan lebih diperjelaskan Pasal 6 ayat 1 dan 2
 - 4) Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh KPU.
 - 5) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

5.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam Pemilihan mempunyai peran yang sangat penting, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan hanya sebagai objek namun dapat sebagai subjek. Dengan demikian kerjasama antara masyarakat dan pihak Pemerintah serta para calon harus dapat menciptakan kondisi Pemilihan yang dinamis sehingga manfaat Pemilihan dapat dirasakan secara bersama.

Masyarakat dapat berpartisipasi secara operasional dalam proses Pemilihan Calon Anggota Legislatif, pelaksanaan pembangunan, menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan tersebut. Berikut ini disajikan dalam jawaban responden terhadap keseluruhan pertanyaan tentang partisipasi masyarakat sebagai variable X berdasarkan angket yang disebar.

5.3.1. Pendaftaran Pemilih

Dalam Pendaftaran Pemilih pihak kelurahan maupun Panitia Pemilu harus mendata lebih akurat. Karena tanpa adanya masyarakat pemilihan kurang berjalan dengan baik. Salah satu kelancaran dari sebuah Demokrasi adalah masyarakat itu sendiri.. Hal ini tentunya harus melibatkan masyarakat, sebelum ditetapkan menjadi suatu keputusan pemilihan yang lebih baik. Sehingga masyarakat merasa memiliki hak penuh tentang Pemilihan DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat kita lihat jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 5.4
Distribusi Jawaban Responden Tentang
Masukan Tata Cara Pandataan Pemilih

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
----	----------	-----------	------------

1	Pernah	70	70%
2	Kadang-kadang	25	25%
3	Tidak pernah	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang memberikan masukan tata cara pendataan pemilih yaitu, 70 responden (70%) menjawab pernah, 25 responden (25%) menjawab kadang-kadang, 5 responden (5%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang memberikan masukan tata cara Pemilihan, ternyata tanggapan responden termasuk dalam kategori pernah memberikan masukan, yakni sebanyak 70 orang responden (70). Hal ini dikarenakan masyarakat sangat mengetahui ada tidaknya pendataan baru terhadap Pemilih DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.5
Distribusi Jawaban Responden Tentang
Usulan Yang Diterima Oleh Panitia Pemilihan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	65	65%
2	Kadang-kadang	25	25%
3	Tidak pernah	10	10%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang usulan yang diterima oleh Panitia Pemilihan yaitu 65 responden (65%) menjawab pernah, 25 responden (25%) menjawab kadang-kadang, 10 responden (10%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang usulan yang diterima oleh panitia Pemilihan, ternyata tanggapan responden termasuk dalam kategori pernah, yakni sebanyak 65 orang responden (65%). Hal ini dikarenakan panitia pemilihan menggunakan data baru di Kecamatan sebelumnya, sehingga terjadi pendataan baru pada saat Pemilihan DPRD 2009-2014.

Tabel 5.6
Distribusi Jawaban Responden Tentang Melihat Daftar Pemilih Tetap

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	77	77%
2	Kadang-kadang	12	12%
3	Tidak pernah	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang melihat daftar pemilihan tetap yaitu, 77 responden (77%) menjawab pernah, 12 responden (12%) menjawab kadang-kadang, 11 responden (11%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang melihat daftar pemilih tetap, ternyata tanggapan responden termasuk dalam kategori pernah melihat, yakni sebanyak 77 orang responden (77%). Hal ini dikarenakan panitia pemilihan cepat dan tanggap terhadap pentingnya penempelan Daftar Pemilih Tetap.

Tabel 5.7
Distribusi Jawaban Responden Tentang Mendaftarkan Diri Sebagai Pemilih

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	58	58%
2	Kadang-kadang	23	23%
3	Tidak pernah	19	19%

Jumlah	100	100%
---------------	------------	-------------

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang mendaftarkan diri sebagai pemilih yaitu, 58 responden (58%) menjawab pernah, 23 responden (23%) menjawab kadang-kadang, 19 responden (19%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang mendaftarkan diri sebagai pemilih, ternyata tanggapan responden termasuk dalam kategori pernah, yakni sebanyak 58 orang responden (58%). Hal ini dikarenakan masyarakat tahu adanya pendaftaran pemilih ulang sebelum menjadi DPT.

Tabel 5.8
Distribusi Jawaban Responden Tentang Tanggapan
Panitia Pemilu Terhadap Masyarakat Yang Tidak Terdaftar

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Baik	61	61%
2	Kurang baik	30	30%
3	Tidak baik	9	9%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang tanggapan panitia Pemilu terhadap masyarakat yang tidak terdaftar yaitu, 61 responden (61%) menjawab pernah, 30 responden (30%) menjawab kadang-kadang, 9 responden (9%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang tanggapan panitia pemilu terhadap masyarakat yang tidak terdaftar, ternyata 61 orang responden (61%). Hal ini dikarenakan

panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat Kecamatan adanya pendaftaran ulang.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pendaftaran Pemilih

No	Kategori			Jumlah
	Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1	70	25	5	100
2	65	25	10	100
3	77	12	11	100
4	58	23	19	100
5	61	30	9	100
6	331	115	54	500
Rata-rata	66 (66%)	23 (23%)	11 (11%)	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai pendaftaran Pemilihan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis di kategorikan pernah, di nyatakan sebanyak 66 (66%) orang menyatakan pernah. Dikarenakan panitia pemilihan mengambil data baru dan panitia Pemilihan bekerja semaksimal mungkin untuk menempelkan data pemilih tetap sehingga membuat masyarakat cepat mengetahui daftar pemilih tetap (DPT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharin Toha sebagai ketua KPPS pada tanggal 07 April 2009 tentang pendaftaran pemilihan beliau menyakan bahwa tidak ada pendaftaran kembali sebelum ada intruksi dari Kabupaten. Namun ketika penulis menanyakan kepada pihak RT bahwa ada pemuktahiran namun belum dilaksanakan karena data yang lama sudah ditetapkan.

5.3.2. Analisis Kampanye

Kampanye merupakan sarana promosi calon untuk mengenalkan diri mereka lebih dekat dan lebih terkenal kepada masyarakat. Disini calon juga berusaha untuk menyakinkan masyarakat dengan visi dan misi yang konsep supaya masyarakat memilih mereka. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 5.10
Distribusi Jawaban Responden Tentang Mengikuti Kampanye

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	80	80%
2	Kadang-kadang	15	15%
3	Tidak pernah	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang mengikuti kampanye, yaitu 80 responden (80%) menjawab pernah, 15 responden (15%) menjawab kadang-kadang, 5 responden (5%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang mengikuti kampanye, ternyata tanggapan responden termasuk dalam kategori baik, yakni sebanyak 80 orang responden (80%). Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki wakil rakyat yang bertanggung jawab didalam kampanye yang selama ini tidak pernah terealisasi.

Tabel 5.11
Distribusi Jawaban Responden Tentang Memberikan Masukan Tata Cara Kampanye

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	65	65%
2	Kadang-kadang	15	15%
3	Tidak pernah	20	20%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang memberikan masukan tata cara kampanye, yaitu 65 responden (65%) menjawab pernah, 15 responden (15%) menjawab kadang-kadang, 20 responden (20%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang memberikan masukan tata cara kampanye, ternyata tanggapan responden termasuk dalam kategori pernah, yakni sebanyak 65 orang responden (65%). Hal ini dikarenakan masyarakat mengenali calon yang akan naik menjadi Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.12
Distribusi Jawaban Responden Tentang
Mempertanyakan Visi Dan Misi Calon

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	75	75%
2	Kadang-kadang	15	15%
3	Tidak pernah	10	10%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang mempertanyakan visi dan misi calon, yaitu 75 responden (75%) menjawab pernah, 15 responden (15%) menjawab kadang-kadang, 10 responden (10%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang mempertanyakan visi dan misi calon, ternyata tanggapan responden termasuk dalam kategori pernah, yakni sebanyak 75 orang responden (75%). Hal ini dikarenakan masyarakat mengharapkan visi dan misi dari para calon itu terlaksana.

Tabel 5.13
Distribusi Jawaban Responden Tentang Melihat Pelanggaran Kampanye

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	25	25%
2	Kadang-kadang	55	55%
3	Tidak pernah	20	20%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang melihat pelanggaran kampanye, yaitu 25 responden (25%) menjawab pernah, 55 responden (55%) menjawab kadang-kadang, 20 responden (20%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang melihat pelanggaran kampanye, ternyata tanggapan responden termasuk dalam kategori kadang-kadang, yakni sebanyak 55 orang responden (55%). Hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui aturan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU.

Tabel 5.14
Distribusi Jawaban Responden Tentang
Melaporkan Pelanggaran Kepada Panwaslu

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	34	34%
2	Kadang-kadang	35	35%
3	Tidak pernah	31	31%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu, yaitu 35 responden (35%) menjawab pernah, 34 responden (34 %) menjawab kadang-kadang, 31 responden (31%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil tanggapan responden tentang melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu, ternyata tanggapan responden termasuk dalam kategori kadang-kadang, yakni sebanyak 35 orang responden (35%). Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa laporannya tidak ditanggapi dengan baik oleh Panwaslu.

Tabel 5.15
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kampanye

No	Kategori			Jumlah
	Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1	80	15	5	100
2	65	15	20	100
3	75	15	10	100
4	25	55	20	100
5	34	35	31	100
6	279	135	86	500
Rata-rata	56 (56%)	27 (27%)	17 (17%)	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai kampanye di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis di kategorikan pernah, di nyatakan sebanyak 56 orang (56%) menyatakan pernah. Dikarenakan masyarakat menanggapi dan mendengarkan janji-janji para calon yang selama ini pernah terealisasi dengan baik.

Penulis juga mewawancarai Bapak Amat tim dari salah satu partai beliau menyatakan bahwa kampanye bukanlah suatu kemenangan yang mutlak didapatkan dari

calon, kampanye hanyalah serimonial untuk mengenalkan diri sedangkan calon dari kami sudah dikenal orang.

Penulis juga bertanya kepada beberapa masyarakat yang mengisi angket, Kabupaten Bengkalis tentang kampanye. Mereka menyatakan ingin ikut kampanye bukanlah suatu kemenangan yang kita harapkan pada hari pemilihan saja, disana baru kita tahu siapa yang menang dan kalah.

Penulis juga menyimpulkan bahwa masyarakat sangat ingin janji-janji para calon itu terlaksana, mendengarkan janji-janji para calon yang dari dulu sampai saat sekarang ini terealisasi dengan baik dan masyarakat ingin melihat bukti dari para calon yang akan naik nanti.

5.3.3. Pemilihan

Pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan yang dilaksanakan ini adalah untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Pemilihan juga salah satu alat untuk menuju demokrasi, yang mana diharapkan semua masyarakat dituntut untuk ikut serta (Berpartisipasi) dalam menentukan wakil mereka. tanpa adanya masyarakat yang memilih maka belum dikatakan Negara Indonesia Negara yang demokrasi. Dari keterangan diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16
Distribusi Jawaban Responden Tentang Datang Untuk Memilih

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
----	----------	-----------	------------

1	Datang memilih	72	72%
2	Datang	18	18%
3	Tidak datang	10	10%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang datang untuk memilih yaitu 72 responden (72%) menjawab datang memilih, 18 responden (18 %) menjawab datang , 10 responden (10%) menjawab tidak datang.

Dari hasil tanggapan responden tentang datang untuk memilih, ternyata anggapan 72 orang responden (72%). Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan mereka terdata dalam data pemilih tetap untuk datang memilih.

Tabel 5.17
Distribusi Jawaban Responden Tentang
Memilih Salah Satu Calon

No	Ketegori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	53	53%
2	Kadang-kadang	26	26%
3	Tidak pernah	21	21%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang tata cara memilih berdasarkan hati nurani yaitu 53 responden (53%), menjawabnya 26 responden (26%) kurang baik, 21 responden (21%) menjawab tidak datang. Dengan demikian dapat diketahui partisipasi masyarakat tentang tata cara pemilihan tinggi.

Dari hasil tanggapan responden tentang memilih satu calon, ternyata anggapan responden termasuk dalam kategori tinggi untuk memilih salah satu calon, yakni sebanyak 53 orang responden (53%). Hal ini dikarenakan masyarakat sudah bisa memilih lebih baik dari pada tahun sesudahnya.

Tabel 5.18
Distribusi Jawaban Responden Tentang Tata Cara Pemilihan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Baik	31	31%
2	Kurang baik	48	48%
3	Tidak baik	21	21%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang tata cara memilih yaitu 31 responden (31%) menjawab pernah, 48 responden (48%) kurang baik, 21 responden (21%) menjawab tidak baik.

Dari tanggapan responden tentang tata cara pemilihan, ternyata anggapan responden sebesar 48 orang responden (48%) menyatakan kurang baik. Hal ini dikarenakan banyak para calon yang belum memberikan arahan tentang tata cara pemilihan disaat penyampaian visi dan misi para calon.

Tabel 5.19
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pemilihan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Baik	75	75%
2	Kurang baik	22	22%
3	Tidak baik	3	3%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang pelaksanaan pemilihan yaitu 75 responden (75%) menjawab baik, 22 responden (22%) menjawab kurang baik, 3 responden (3%) menjawab tidak baik.

Dari tanggapan responden tentang pelaksanaann pemilihan, ternyata anggapan responden tentang pemilihan termasuk dalam kategori baik, yakni sebanyak 75 orang responden (75%). Hal ini dikarenakan masyarakat melihat dari mulai proses administrasi saksi sampai dengan pembukaan kotak suara berjalan dengan baik.

Tabel 5.20
Distribusi Jawaban Responden Tentang Waktu Pemilihan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Tepat waktu	29	29%
2	Kurang tepat waktu	58	58%
3	Tidak tepat waktu	13	13%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang waktu pemilihan yaitu 29 responden (29%) menjawab tepat waktu, 58 responden (58%) menjawab kurang tepat waktu, 13 responden (13%) menjawab tidak tepat waktu.

Dari tanggapan responden tentang waktu pemilihan, ternyata anggapan responden termasuk dalam kategori kurang baik, yakni sebanyak 58 orang responden (58%). Hal ini dikarenakan masyarakat merasa waktu yang diberikan panitia pemilihan sangat lama.

Tabel 5.21

Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pemilihan

No	Kategori			Jumlah
	Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1	72	18	10	100
2	53	26	21	100
3	31	48	21	100
4	75	22	3	100
5	29	58	13	100
6	260	172	68	500
Rata-rata	52 (52%)	34(34%)	14 (14%)	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai pemilihan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis di kategorikan pernah, di nyatakan sebanyak 52 orang (52%) menyatakan pernah.

Dikarenakan masyarakat sangat antusias dalam pemilihan melihat banyaknya calon yang ingin naik ke kursi DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan ingin lebih memajukan dari tahun yang kemaren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kohar sebagai masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15 April 2009 beliau mengatakan untuk masyarakat pemilihan tahun ini sangat beda dengan tahun sebelumnya namun melihat sistem pemilihan seperti ini beliau termotivasi untuk memilih salah satu, apa ikut kampanye, menang orang dia juga kalah dia juga terus tak ada untungnya calon dan kebetulan salah satu calon yang ingin naik temannya.

Penulis juga mewawancarai Bapak Jur'I beliau menyatakan tidak memilih dikarenakan terlalu lama menunggu giliran dan dia pulang. Selanjutnya penulis juga

menanyakan pada Bapak Pi'I mengapa Bapak tidak memilih, beliau menjawab dikarenakan saya tidak terdaftar sebagai pemilih.

5.3.4. Penghitungan Suara

Penghitungan suara merupakan penentuan salah satu calon atau lebih yang mana penghitungan itu dihadiri oleh saksi-saksi dari setiap calon dan panitia pemilu. Penghitungan suara dilaksanakan secara transparan (Terbuka) agar masyarakat tahu dan mengerti tentang penghitungan suara. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 5.22
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kehadiran Saat Pemungutan Suara

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Hadir	59	59%
2	Kadang-kadang	30	30%
3	Tidak hadir	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang saat pemungutan suara yaitu 59 responden (59%) menjawab hadir, 30 responden (30 %) menjawab kadang-kadang, 11 responden (11%) menjawab tidak hadir.

Dari tanggapan responden tentang saat pemungutan suara, ternyata anggapan responden termasuk dalam kategori hadir, yakni sebanyak 59 orang responden (59%). Hal ini dikarenakan masyarakat ingin melihat langsung tata cara pemungutan suara.

Tabel 5.23
Distribusi Jawaban Responden Tentang Sistem Penghitungan Suara

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Baik	42	42%
2	Kurang baik	32	32%

3	Tidak baik	26	26%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang sistem penghitungan suara yaitu 42 responden (42%) menjawab baik, 32 responden (32%) menjawab kurang baik, 26 responden (26%) menjawab tidak baik.

Dari tanggapan responden tentang sistem penghitungan suara, ternyata anggapan responden termasuk dalam kategori kurang baik, yakni sebanyak 42 orang responden (42%). Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan sistem penghitungan suara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan ada yang menyimpang dari aturan yang berlaku.

Tabel 5.24
Distribusi Jawaban Responden Tentang
Adanya Pelanggaran Disaat Penghitungan Suara

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	38	38%
2	Kadang-kadang	12	12%
3	Tidak pernah	50	50%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang pelanggaran yaitu 38 responden (38%) menjawab pernah, 12 responden (12%) menjawab kadang-kadang, 50 responden (50%) menjawab tidak pernah.

Dari tanggapan responden tentang adanya pelanggaran disaat penghitungan suara, ternyata anggapan responden termasuk dalam kategori tidak pernah, yakni sebanyak 50 orang responden (50%). Hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui aturan yang telah dibuat oleh KPU dan panitia pemilu membuat masyarakat menjadi enggan untuk ikut berpartisipasi.

Tabel 5.25
Distribusi Jawaban Responden Tentang
Memberikan Masukan Terhadap Pelanggaran

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	22	22%
2	Kadang-kadang	14	14%
3	Tidak pernah	64	64%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang memberikan masukan terhadap pelanggaran yaitu 22 responden (22%) menjawab pernah, 14 responden (14%) menjawab kadang-kadang, 64 responden (64%) menjawab tidak pernah.

Dari tanggapan responden tentang memberikan masukan terhadap pelanggaran, ternyata anggapan responden termasuk dalam kategori tidak pernah, yakni sebanyak 64 orang responden (64%). Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan panitia pemilu tidak pernah memberikan pelajaran tentang aturan penghitungan suara dan masyarakat kurang mengetahui aturan yang ada.

Tabel 5.26
Distribusi Jawaban Responden Tentang
usulan penyelesaian pelanggaran

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	54	54%
2	Kadang-kadang	13	13%
3	Tidak pernah	33	33%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang usulan penyelesaian pelanggaran yaitu 54 responden (54%) menjawab pernah, 13 responden (13 %) menjawab kadang-kadang, 33 responden (33%) menjawab tidak pernah.

Dari tanggapan responden tentang usulan penyelesaian pelanggaran, ternyata anggapan responden termasuk dalam kategori pernah, yakni sebanyak 54 orang responden (54%). Hal ini dikarenakan masyarakat mengetahui dan banyaknya masyarakat hadir disaat penghitungan suara hingga usulan yang diberikan oleh beberapa orang cepat ditanggapi.

Tabel 5.27
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Penghitunagan Suara

No	Kategori			Jumlah
	Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1	59	30	11	100
2	42	32	26	100
3	38	12	50	100
4	22	14	64	100
5	54	13	33	100
6	215	101	184	500
Rata-rata	43(43%)	20 (20%)	37(37%)	100%

Sumber: Data angket, 2009

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai penghitungan suara di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis di kategorikan pernah, di nyatakan sebanyak 43 orang (43%) menyatakan pernah.

Dari rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat tentang penghitungan suara tinggi, dinyatakan sebanyak 43 orang (43%) menjawab pernah.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan pada tanggal 16 april 2009, pada Bapak Udin beliau menyatakan penghitungan suara mengapa harus diikuti, kan kita tahu nanti akhirnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Tabel 6.1
Rekapitulasi Keseluruhan Data Pemilihan

No	Kategori			Jumlah
	Pernah	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1	52	18	10	100
2	43	26	21	100
3	56	48	21	100
4	66	22	3	100
5	217	104	79	400
Rata-rata	54,25%	26%	19,75%	100%

Sumber: Data Rekapitulasi Angket Keseluruhan, 2009

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan Calon Anggota Legislatif Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis priode 2009-2014 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dari 56.445 populasi responden, didapat sampel 100 orang responden dengan tingkat kesalahan 10%. Rata-rata hasil keseluruhan responden menjawab pernah 54,25% responden, kadang-kadang 26% responden, tidak pernah 19,75% responden. Jumlah keseluruhan masyarakat berpartisipasi ditinjau dari persentase sebanyak 54,25 persen.

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tinggi dilihat dari hasil angket yang peneliti sebar dan wawancara.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu penulis kemukakan sesuai dengan hasil penelitian dalam Pemilihan Calon Anggota legislatif Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis priode 2009-2014 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis:

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis perlu di acungkan jempol, Karena aparat Pemerintah bisa memotivasi masyarakat aktif dari pada sebelumnya.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan (Menggunakan haknya) yang sesuai dengan keinginannya
3. Perlu kiranya penataan kembali sistem pendaftaran yang lebih terbuka dalam pendata pemilih, Pemerintah juga harus aktif dalam mendata agar masyarakat terdaftar secara merata dan bisa menggunakan haknya sebagai pemilih.

Agar masyarakat sadar dengan hak yang dimilikinya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, *Demokrasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, PT. Bumi Wali Songo 2002
- Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Arifin, Anwar, *Komunikasi Politik*, PT Balai Pustaka, Jakarta 2003
- Huntington Samuel P. dan Nelson, Joan, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta 1994
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Mariam Budiarjo, *Pusat-Pusat Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000
- _____, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Merphin Panjaitan, *Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi*, Jakarta, 2001
- Mohtar Mas'ood dan collin Macadrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- Morris Rosenberg, *Partisipasi Politik*, Sri Erlanda, 2005
- Saligman dan Edwin, *Muhammad Al-Amin*, 2003
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineke Cipta, Jakarta, 1990
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2005
- UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu
- UU No.11 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah

ANGKET PENELITIAN

**Kepada Yth,
Bapak/Ibu Masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis
Di - Tempat**

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dalam menunjang pelaksanaan penelitian maka saya mengajukan permohonan bantuan kerjasama untuk dapat kiranya Bapak/Ibu mengisi sejumlah angket dan memberikan sejumlah penjelasan atas pertanyaan yang dimaksud untuk tujuan sebagai dasar analisa dalam penulisan laporan penelitian (Skripsi)

Adapun permasalahan yang hendak dipaparkan pada laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah: **“Analisis Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2009 Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**.

Dan selanjutnya skripsi ini hanya dikonsumsi untuk kalangan Akademis dan tidak diedarkan pada masyarakat banyak. Untuk ini saya berharap bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu sekalian. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

I. Petunjuk Pengisian:

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2009 Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis” dan tidak berpengaruh terhadap kerja, karier Bapak/Ibu.

- a. Mohon kesedian Bapak/Ibu untuk membaca setiap pertanyaan dengan teliti serta menjawab pertanyaan dengan benar, jujur dan jelas.
- b. Berilah tanda X (silang) pada salah satu jawaban dari setiap pertanyaan.

II. Identitas Peneliti

Nama : RENDY YOVIELDY
NIM : 10576002265
Jurusan : Administrasi Negara UIN SUSKA Riau
Program Studi : S1

III. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin/Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan terakhir :

IV. DAFTAR PERTANYAAN

1. Variabel : Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

A. Pendaftaran Pemilih

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengusulkan kepada panitia pemilu dalam Pendaftaran Pemilih Calon Legislatif Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2009-2014?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
2. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan masukan kepada panitia pemilu agar bisa terdata dalam Pemilihan Calon Legislatif Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk kemengannya?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
3. Apakah saran Bapak/Ibu pernah ditanggapi dengan baik oleh panitia penyelenggara pemilu?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
4. Apakah Bapak/Ibu pernah berpartisipasi dalam pendataan Pemilihan Calon Legislatif 2009-2014?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang

- c. Tidak pernah
- 5. Apakah Bapak/Ibu pernah datang ketempat pendaftaran untuk melihat bahwa Bapak/Ibu terdaftar atau tidak?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

B. Kampanye

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kampanye yang diadakan oleh partai politik?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
2. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan masukan kepada semua calon anggota Legislatif tentang tata cara kampanye untuk kemenangannya?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kampanye tertutup/terbuka dengan Calon Anggota DPRD?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

4. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat salah satu calon melanggar peraturan kampanye yang telah diatur?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
5. Apakah Bapak/Ibu pernah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu ketika ada pelanggaran kampanye ?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

C. Pemilihan

1. Apakah Bapak/Ibu ikut (Berpartisipasi) dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2009-2014?
 - a. Ikut
 - b. Tidak ikut
 - c. Ikut-ikutan
2. Apakah Bapak/Ibu merasakan hasil Pemilihan Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014 sangat memuaskan ?
 - a. Merasakan
 - b. Kurang merasakan
 - c. Tidak merasakan

3. Apakah Bapak/Ibu senang ketika ingin memilih Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Priode 2009-2014?
 - a. Senang
 - b. Kurang senang
 - c. Tidak senang
4. Apakah Bapak/Ibu pernah ditunjuk untuk memilih salah satu Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
5. Apakah Bapak/Ibu ada melihat pelanggaran dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2009-2014?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak ada

D. Penghitungan Suara

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis disaat penghitungan berlangsung?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak tidak baik
3. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan masukan ketika penghitungan suara berlangsung?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
4. Apakah Bapak/Ibu ikut (Berpartisipasi) disaat penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2009-2014?
 - a. Ikut serta (Berpartisipasi)
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak ikut
5. Di dalam penghitungan suara apakah Bapak/Ibu pernah melihat kecurangan (Pelanggaran)?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Pernah

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui visi dan misi dari setiap calon yang mau naik ke kursi DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2009-2014?
2. Apakah Bapak/Ibu mengikuti secara langsung dalam kampanye Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2009-2014?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa biaya setiap Caleg yang ingin naik?
4. Apakah dalam Pemilihan Anggota DPRD Bapak/Ibu disuruh untuk memilih salah satu Calon Anggota DPRD?
5. Apa yang membuat Bapak/Ibu memilih anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
6. Mengapa Bapak/Ibu tidak ikut Memilih Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
7. Apakah Bapak/Ibu merasa bertanggung jawab dengan hak yang Bapak/Ibu berikan kepada setiap calon?
8. Dengan terpilihnya salah satu Calon Anggota DPRD, apakah bisa merubah pembangunan?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu dengan memilih salah satu Calon Anggota DPRD bisa mengembangkan suatu daerah?
10. Apakah Bapak/Ibu selalu menginginkan yang terbaik untuk setiap Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
11. Apakah Bapak/Ibu menghadiri pada perhitungan suara Calon Anggota DPRD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?

12. Mengapa Bapak/Ibu ikut dalam penghitungan suara Calon Anggota DPRD
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?